

Pansus Buru Dokumen Kertas Kerja BPK

PANSUS Hak Angket Bank Century terus memburu dokumen penyelidikan yang belum mereka dapat, terutama data kertas kerja pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk keperluan itulah, kemarin, Ketua Pansus Idrus

Marham dan Wakil Ketua Gayus Lumbuun mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat penetapan penyalinan data itu.

Keduanya mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua PN Jakarta Pusat Syahrial Sidik beserta jajarannya. "Kita meminta surat penetapan agar dapat menyalin data KKP (kertas kerja). BPK sudah memberikan data, tetapi ternyata ada data yang belum diberikan," terang Idrus se usai pertemuan.

Mereka meminta PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penetapan tersebut sebelum masa kerja Pansus Angket Bank Century berakhir pada 4 Maret 2010. Ketua PN Jakpus menyatakan akan mempelajari

Kesamaan Pandangan Partai

Proses akuisisi dan merger bermasalah.

Pengucuran FPJP bermasalah.

Parameter *bailout* tidak terukur.

Pengawasan BI lemah.

BI melakukan pelanggaran peraturan.

Sumber : PDIP/Golkar/PKS
Grafis : Fredy

permohonan itu dan segera mengambil keputusan.

Berdasarkan Pasal 19 UU No 6/1954, pansus memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau penyalinan surat-surat di lembaga negara. "Atas dasar aturan itu, kita memilih untuk menyalin, bukan menyita," jelas Gayus.

Sebelumnya pimpinan pansus menemui pimpinan Mahkamah Agung untuk meminta fatwa penyitaan dokumen. Namun, fatwa itu tidak jadi dimintakan karena BPK menolak menyerahkan dokumen kalau pansus hanya menggunakan pendapat hukum MA atau fatwa.

Wapres Boediono, melalui Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, mengatakan tidak khawatir jika

pansus membuka semua dokumen Century. "Sejak awal Pak Boediono menginginkan pansus dapat membuat semua menjadi jelas."

Sementara itu, Fraksi PDIP menyebut empat lembaga, yaitu Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Koordinasi, dan Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan pelanggaran.

BI melanggar dalam proses akuisisi dan merger, KSSK dinilai tidak menggunakan indikator yang jelas saat menetapkan Century sebagai bank gagal sistemik, sedangkan LPS disebut menyalahi prinsip *good governance* saat pengucuran dana Rp6,7 triliun ke Century. (Dvd / Ken / Tup / X-10)